



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI TENGAH PROBLEMATIKA INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI DAERAH 3T

Siti Fathiah¹, Queen Indra Valisha², Fathi Giallarossi³, Byan Nugraha⁴, Malka Kuwaysa Nur Zalva⁵, Irene Mailandani⁶

¹²³⁴⁵⁶ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2026

Revised September 2026

Accepted September 2026

Available September 2026

Corresponding author:

Siti Fathiah

1241003035@student.bakrie.ac.id

Author emails:

1241003001@student.bakrie.ac.id

1251003030@student.bakrie.ac.id

1251003146@student.bakrie.ac.id

1251003143@student.bakrie.ac.id

1241711035@student.bakrie.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendukung pemenuhan gizi peserta didik, tetapi pelaksanaannya di daerah 3T menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini menganalisis implementasi MBG dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas pendidikan melalui pendekatan kualitatif *library research* dengan sumber jurnal, regulasi, dokumen kebijakan, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis melalui klasifikasi, sintesis, dan interpretasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi MBG dipengaruhi kondisi wilayah, sarana pendukung, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi, dan pengawasan. MBG dapat mendukung pemenuhan hak atas pendidikan melalui aspek gizi, tetapi tidak menggantikan kebutuhan infrastruktur pendidikan. Pelaksanaannya perlu berjalan seiring dengan kebijakan pemerataan pendidikan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis; hak atas pendidikan; daerah 3T; infrastruktur pendidikan; implementasi kebijakan.

ABSTRACT

Free Nutritious Meals (MBG) Program supports students' nutritional needs, but its implementation in the 3T regions faces geographical and infrastructure constraints. This study analyzes MBG implementation in relation to fulfillment of right to education through a qualitative library research approach using journals, regulations, policy documents, and previous studies. Data were analyzed through classification, synthesis, and interpretation. The findings indicate that MBG implementation is influenced by regional conditions, supporting facilities, human resource capacity, coordination, and supervision. MBG can support fulfillment of right to education through nutritional provision, but it cannot replace the need for adequate educational infrastructure. Its implementation should therefore be integrated with education equity policies and adapted to the characteristics of each region.

Keywords: Free Nutritious Meals; right to education; 3T regions; educational infrastructure; policy implementation.

1. PENDAHULUAN

Edukasi merupakan salah satu hak perlu dipenuhi oleh warga negara dan menjadi bagian krusial membangun kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan hak tersebut bukan saja berkaitan dengan tersedianya sekolah, tetapi juga dengan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang layak dan merata. Dalam praktiknya, pemerataan pendidikan masih menghadapi berbagai kendala



karena setiap wilayah memiliki kondisi geografis dan sosial yang berbeda. Persoalan ini lebih terlihat di daerah 3T yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, akses teknologi, serta berbagai fasilitas pendukung pembelajaran. (Astuti & Maisaroh, 2025) menunjukkan bahwa keterbatasan ruang kelas, media pembelajaran, dan akses teknologi di sekolah 3T dapat memengaruhi kualitas pembelajaran serta membatasi kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang beragam.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan tempat pendidikan diselenggarakan. Infrastruktur pendidikan menjadi salah satu prasyarat penting bagi berlangsungnya pembelajaran secara efektif. Ketimpangan fasilitas antara wilayah perkotaan dan 3T berpotensi menciptakan perbedaan pengalaman belajar bagi peserta didik. (Rosmana et al., 2024) Pemerataan pendidikan di daerah 3T membutuhkan dukungan yang berkelanjutan, baik melalui kebijakan maupun penyediaan layanan yang sesuai dengan kondisi setiap wilayah. Persoalannya bukan hanya mengenai ada atau tidaknya sekolah, tetapi juga menyangkut kemampuan sistem pendidikan dalam menyediakan fasilitas dan lingkungan belajar yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Di samping infrastruktur, pemenuhan kebutuhan peserta didik juga mencakup aspek gizi. Sejak 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan nasional mencakup pelajar. (Wang et al., 2021), menunjukkan program makanan sekolah berkaitan dengan hasil kesehatan dan pendidikan, termasuk pertumbuhan serta kehadiran siswa.

Di Indonesia, penelitian mengenai implementasi MBG mulai berkembang seiring pelaksanaan program tersebut. (Febryanti et al., 2025), di SDN 3 Kepanjen, Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG didukung kebijakan pemerintah dan sekolah, tetapi masih terkendala anggaran serta tata kelola. Kajian terkait juga menyatakan pencapaian program bukan saja bergantung dalam penyediaan makanan, namun turut dipengaruhi kesiapan sekolah, sumber daya manusia, fasilitas, distribusi, dan koordinasi antarpihak. Persoalan implementasi tersebut menjadi lebih kompleks ketika MBG diterapkan di wilayah 3T. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, jarak antarlokasi, dan karakteristik layanan publik dapat memengaruhi distribusi serta pengelolaan program. Kajian mengenai MBG menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas antarwilayah dan keterbatasan infrastruktur distribusi merupakan tantangan dalam pelaksanaan program secara merata. Karena itu, desain implementasi perlu mempertimbangkan kondisi lokal agar kebijakan nasional dapat diterapkan sesuai karakteristik wilayah.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya mengkaji keterkaitan antara kebijakan MBG, infrastruktur pendidikan, dan pemenuhan hak atas pendidikan di daerah 3T. MBG pada dasarnya merupakan kebijakan pemenuhan gizi dan bukan pengganti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Namun, pelaksanaannya berlangsung dalam lingkungan pendidikan dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. Sekolah dengan keterbatasan ruang, fasilitas pendukung, akses distribusi, dan sumber daya manusia menghadapi kondisi implementasi yang berbeda dari sekolah dengan dukungan infrastruktur lebih memadai. Oleh sebab itu, implementasi MBG dalam perspektif hak atas pendidikan perlu ditempatkan dalam konteks struktural tempat kebijakan tersebut dilaksanakan.

Penelitian terdahulu telah membahas MBG dari perspektif implementasi kebijakan, kesiapan sekolah, tata kelola, serta dampaknya terhadap pendidikan dan sumber daya manusia. Sementara itu, penelitian mengenai pendidikan di daerah 3T lebih banyak menyoroti pemerataan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kesenjangan akses pendidikan. Berdasarkan literatur yang ditelaah, kedua pembahasan tersebut masih relatif sering ditempatkan secara terpisah.

Kajian MBG cenderung berfokus pada pelaksanaan program dan manfaat gizi, sedangkan kajian pendidikan 3T lebih menekankan persoalan akses dan infrastruktur. Ruang kajian muncul ketika implementasi MBG dianalisis bersamaan dengan kondisi infrastruktur pendidikan dalam kerangka pemenuhan hak atas pendidikan.

Penelitian ini membahas implementasi MBG di daerah 3T serta kaitannya dengan pemenuhan hak atas pendidikan dalam kondisi infrastruktur yang terbatas. Kajian ini menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan bukan saja bergantung dalam program di tingkat nasional, namun pada kemampuan menyesuaikannya dengan kondisi wilayah dan kapasitas layanan yang tersedia. Dengan demikian, MBG tidak ditempatkan sebagai solusi langsung terhadap persoalan infrastruktur pendidikan, melainkan sebagai kebijakan yang implementasinya dipengaruhi oleh kondisi struktural wilayah dan kualitas layanan pendidikan.

Kontribusi penelitian terletak pada integrasi tiga dimensi, yaitu implementasi kebijakan MBG, problematika infrastruktur pendidikan di daerah 3T, dan pemenuhan hak atas pendidikan. Integrasi ketiga aspek tersebut diinginkan membagikan gambaran lebih utuh perihal tantangan pelaksanaan kebijakan di wilayah dengan keterbatasan struktural serta pentingnya penyesuaian kebijakan berdasarkan karakteristik wilayah. Menurut uraian ini, riset ini bermaksud menganalisis implementasi kebijakan MBG dalam perspektif pemenuhan hak atas pendidikan di tengah keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah 3T. Secara khusus, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kondisi implementasi MBG di daerah 3T, menguraikan problematika infrastruktur pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan program, serta menganalisis implikasinya terhadap upaya pemenuhan hak atas pendidikan secara merata dan berkeadilan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi menjadi bagian yang menentukan dalam rangkaian kebijakan publik karena pada tahap ini kebijakan yang telah ditetapkan diwujudkan melalui tindakan dan bentuk pelayanan yang nyata. Pencapaian tujuan kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan tujuan serta ketentuan yang mengaturnya, tetapi juga pada kemampuan pihak pelaksana dalam menyesuaikan pelaksanaannya dengan situasi dan kebutuhan di lapangan. Pada topik kebijakan MBG, proses implementasi menjadi penting akibat program dilaksanakan pada satuan pendidikan dan wilayah dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Penelitian dari (Febryanti et al., 2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di SDN 3 Kepanjen mendapat dukungan kebijakan pemerintah, tetapi masih menghadapi kendala anggaran dan tata kelola. Sementara itu (Pora et al., 2025) menyatakan implementasi MBG terpengaruhi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pada wilayah dengan kondisi geografis sulit, tantangan juga muncul dalam akses informasi, kesiapan infrastruktur, dan distribusi program. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, implementasi kebijakan dalam penelitian ini dipahami sebagai proses penerjemahan kebijakan MBG ke dalam pelayanan pemenuhan gizi bagi peserta didik melalui kesiapan pelaksana, ketersediaan sumber daya, komunikasi, koordinasi, distribusi, dan pengawasan. Perspektif ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kondisi wilayah dan keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah 3T dapat memengaruhi pelaksanaan MBG.

2.2 Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan gizi kelompok sasaran, termasuk peserta didik. Penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mencakup aspek tata kelola, pengawasan, evaluasi, pelaporan, serta pendanaan dan pengadaan. Pada konteks edukasi, penyediaan makanan bergizi menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap kondisi peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. (Febryanti et al., 2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di satuan



pendidikan masih dipengaruhi oleh kondisi anggaran dan tata kelola. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG bukan saja bertumpu dalam penyediaan makanan, namun juga membutuhkan kesiapan kelembagaan serta dukungan lingkungan Pendidikan.

Dalam konteks yang lebih luas, (Yuliani et al., 2026) mengaitkan MBG dengan pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan nasional. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa perbedaan kapasitas wilayah dan keterbatasan infrastruktur distribusi, terutama pada daerah dengan kondisi geografis dan layanan yang beragam. Bagi daerah 3T, keterbatasan infrastruktur pendidikan merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui program pemenuhan gizi. (Astuti & Maisaroh, 2025) menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah 3T dapat memengaruhi proses pembelajaran dan pemerataan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan MBG perlu ditempatkan sebagai instrumen pendukung, bukan sebagai pengganti pembangunan infrastruktur pendidikan. Berdasarkan kajian tersebut, program MBG pemerintah yang dilaksanakan melalui lingkungan pendidikan bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan peserta didik. Pelaksanaannya tetap berkaitan dengan kondisi wilayah, ketersediaan sarana pendukung, kapasitas sumber daya, serta kemampuan distribusi. Dengan demikian, analisis MBG di daerah 3T perlu melihat keterkaitannya dengan upaya pemenuhan hak atas pendidikan tanpa mengabaikan persoalan infrastruktur yang masih menjadi bagian penting dari pemerataan layanan Pendidikan.

2.3 Pendidikan di Daerah 3T dan Problematika Infrastruktur

Wilayah 3T menghadapi tantangan geografis dan sosial dalam penyediaan layanan pendidikan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, akses internet dan komunikasi, serta infrastruktur jalan. (Falah & Hadna, 2022) menunjukkan bahwa kendala tersebut saling berkaitan dan menjadikan persoalan pendidikan di daerah 3T bersifat multidimensional. Temuan tersebut diperkuat oleh Astuti dan (Astuti & Maisaroh, 2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas pendidikan, seperti kondisi ruang kelas, media pembelajaran, dan akses teknologi, dapat memengaruhi proses pembelajaran di sekolah 3T. Kondisi tersebut juga dapat membatasi kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan metode yang beragam.

Dalam penelitian ini, infrastruktur dipahami sebagai sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan serta fasilitas pendukung yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan melalui satuan pendidikan. Keterbatasan infrastruktur dapat menciptakan kondisi implementasi yang berbeda antardaerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan nasional seperti MBG perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kapasitas lokal agar mekanisme program dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah penerima manfaat.

2.4. Hak atas Pendidikan dalam Perspektif Pemerataan Layanan

Hak atas pendidikan menempatkan negara pada posisi penting dalam menjamin agar setiap warga negara memperoleh kesempatan pendidikan tanpa dibatasi oleh kondisi geografis maupun sosial. (Melinda R. Radja et al., 2025) menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah memberikan dasar bagi pemenuhan hak atas pendidikan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan pada tingkat masyarakat dan wilayah. Perspektif pemerataan menjadi semakin penting ketika pembahasan diarahkan pada daerah 3T. (Rosmana et al., 2024) menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan di daerah 3T berkaitan dengan persoalan akses layanan, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan tenaga pendidik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup dipahami sebagai penyediaan sekolah secara merata, tetapi

juga membutuhkan dukungan berbagai sumber daya agar layanan pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Dalam hubungan tersebut, MBG dapat dipahami sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap kebutuhan peserta didik melalui lingkungan pendidikan. Namun, pemenuhan hak atas pendidikan tetap membutuhkan kebijakan yang lebih luas, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, akses transportasi, teknologi, serta lingkungan belajar yang memadai. Dengan perspektif tersebut, MBG tidak ditempatkan sebagai pengganti pembangunan infrastruktur pendidikan, melainkan sebagai salah satu bagian dari kebijakan pendukung yang perlu berjalan beriringan dengan upaya pemerataan layanan pendidikan.

2.5 Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penelitian terdahulu mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa kajian mengenai program tersebut berkembang pada beberapa fokus. Pertama, penelitian mengenai implementasi MBG membahas berbagai kondisi yang memengaruhi pelaksanaan program. (Herdiana, 2025), misalnya, mengidentifikasi dukungan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan sebagai faktor pendukung, sedangkan regulasi, distribusi, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi.

Kedua, kajian mengenai MBG mulai melihat keterkaitannya dengan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. (Yuliani et al., 2026) menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi perbedaan kapasitas antarwilayah serta kebutuhan akan infrastruktur pendukung distribusi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG bukan saja berkorelasi pada pemenuhan keperluan gizi, namun dipengaruhi oleh kesiapan dan kondisi wilayah dalam mendukung proses distribusi program..

Ketiga, penelitian tentang pendidikan di daerah 3T umumnya menyoroti keterbatasan akses dan sumber daya pendukung. (Falah & Hadna, 2022) mengidentifikasi kendala berupa akses internet dan komunikasi, sarana pendidikan, tenaga pendidik, serta kondisi jalan dan jarak menuju sekolah. Dari ketiga kelompok kajian tersebut, terlihat bahwa penelitian mengenai MBG dan penelitian mengenai pendidikan di daerah 3T masih memiliki fokus yang relatif berbeda. Kajian MBG lebih banyak membahas proses dan faktor yang memengaruhi implementasi program, sedangkan kajian pendidikan 3T lebih menekankan persoalan akses, infrastruktur, dan pemerataan layanan pendidikan.

3. METODE

Riset ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) guna menganalisis implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas pendidikan di daerah 3T mempunyai keterbatasan infrastruktur. Data riset bersumber dari jurnal ilmiah nasional, regulasi, dokumen resmi pemerintah, buku, dan riset sebelumnya yang berkorelasi dengan MBG, pendidikan di daerah 3T, infrastruktur pendidikan, serta hak atas pendidikan. Pemilihan sumber dilaksanakan dengan *purposive* membandingkan relevansi, kredibilitas, keterbaruan, dan keterlacakan sumber.

Riset ini mengandalkan penelusuran dan analisis literatur relevan untuk pengumpulan data. Data diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, reduksi, sintesis, dan interpretasi. Informasi yang relevan dikelompokkan ke dalam tiga tema utama, yaitu implementasi MBG, kondisi infrastruktur pendidikan di daerah 3T, dan pemenuhan hak atas pendidikan. Selanjutnya, temuan dari berbagai sumber dibandingkan dan diinterpretasikan untuk melihat keterkaitan antara pelaksanaan MBG, kondisi infrastruktur, dan pemenuhan hak atas pendidikan di daerah 3T. Selanjutnya, temuan dari berbagai sumber dibandingkan dan disintesis untuk melihat keterkaitan antartema serta memperoleh gambaran mengenai tantangan pelaksanaan MBG dalam konteks keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah 3T.



3.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data riset dihasilkan dengan studi pustaka dan dokumentasi berkaitan dengan fokus penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah jurnal akademik, buku, prosiding, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), implementasi kebijakan publik, pendidikan di daerah 3T, infrastruktur pendidikan, dan pemenuhan hak atas pendidikan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui kajian terhadap regulasi, dokumen kebijakan, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG dan penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T.

Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari berbagai regulasi, pedoman teknis, serta publikasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan MBG dan pendidikan. Seluruh sumber dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan aspek kredibilitas, relevansi dengan fokus penelitian, keterbaruan informasi, dan keterlacakan sumber.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian berfokus pada tiga aspek, yaitu implementasi MBG, problematika infrastruktur pendidikan di daerah 3T, dan pemenuhan hak atas pendidikan. Ketiganya dianalisis secara terpadu dengan menempatkan infrastruktur sebagai kondisi kontekstual yang dapat memengaruhi implementasi MBG, bukan sebagai dampak langsung dari program tersebut.

Ketiga fokus tersebut dianalisis secara terpadu. Infrastruktur pendidikan tidak diperlakukan sebagai dampak langsung dari kebijakan MBG, melainkan sebagai kondisi kontekstual yang dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan. Posisi ini digunakan agar analisis tidak menyamakan program pemenuhan gizi dengan kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan.

3.3 Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan deskriptif-kualitatif menggunakan analisis isi serta analisis tematik. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap setiap sumber untuk mengidentifikasi informasi relevan dengan maksud riset. Informasi sudah diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan menurut kesesuaian dengan fokus kajian. Selanjutnya, data diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi daerah 3T, infrastruktur pendidikan, dan pemenuhan hak atas pendidikan. Setiap tema kemudian dianalisis dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk menemukan keterkaitan, persamaan, maupun perbedaan temuan. Hasil analisis tersebut selanjutnya diinterpretasikan guna menghasilkan wawasan menyeluruh perihal hubungan antara implementasi MBG, kondisi infrastruktur pendidikan, dan pemenuhan hak atas pendidikan di daerah 3T.

Hasil pengelompokan tersebut kemudian dibandingkan dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman mengenai keterkaitan antara pelaksanaan MBG, kondisi infrastruktur pendidikan, dan pemenuhan hak atas pendidikan di daerah 3T. Selanjutnya, temuan dibandingkan dan disintesis dengan teori serta penelitian terdahulu untuk memperoleh interpretasi mengenai keterkaitan implementasi MBG, kondisi wilayah 3T, dan pemenuhan hak atas pendidikan.

3.4 Keabsahan Data

Keabsahan data dilaksanakan dengan triangulasi sumber dengan mempertimbangkan dan mencocokkan keterangan didapatkan dari berbagai sumber, yaitu jurnal ilmiah, regulasi,

dokumen resmi pemerintah, dan penelitian terdahulu. Proses ini dilakukan untuk melihat kesesuaian informasi mengenai implementasi MBG, kondisi pendidikan di daerah 3T, infrastruktur pendidikan, serta pemenuhan hak atas pendidikan. Informasi dari satu sumber dibandingkan dengan sumber lainnya untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan konsistensi temuan. Kredibilitas data juga diperhatikan melalui penggunaan sumber yang relevan, memiliki rujukan yang jelas, dan dapat ditelusuri. Dengan cara tersebut, data yang digunakan dalam analisis memiliki dasar sumber yang memadai dan sesuai dengan fokus penelitian.

Kredibilitas data diperkuat melalui penggunaan sumber akademik serta dokumen resmi yang memiliki rujukan jelas dan dapat ditelusuri. Mengingat penelitian ini tidak melibatkan partisipan secara langsung, aspek etika penelitian ditekankan pada ketepatan pencantuman sitasi, keterlacakan referensi, serta penyajian informasi yang tetap sesuai dengan konteks sumber yang digunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam Lingkungan Pendidikan

Capaian kajian menyatakan pelaksanaan MBG melibatkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan satuan pendidikan, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya pendukung hingga distribusi serta pengawasan. Keterkaitan aspek-aspek tersebut semakin penting di wilayah dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang beragam. Dengan demikian, pelaksanaan MBG bukan saja bertumpu pada penyediaan makanan bergizi, namun pada kesiapan sistem pendukung agar program dapat berjalan sesuai tujuan. (Febryanti et al., 2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di SDN 3 Kepanjen mendapat dukungan dari pemerintah dan pihak sekolah, meskipun masih terkendala anggaran dan tata kelola pendidikan.

Sejalan dengan itu, (Ariani & Rahim, 2025) menunjukkan bahwa kesiapan sekolah, guru, penyedia makanan, serta ketimpangan antarwilayah menjadi aspek penting dalam pelaksanaan MBG. Pada daerah 3T, keterbatasan infrastruktur dan logistik menjadi tantangan yang memerlukan penyesuaian kebijakan berdasarkan kondisi lokal. Kebutuhan penyesuaian pelaksanaan MBG dengan karakteristik wilayah semakin diperkuat melalui penerbitan Pedoman Teknis Tata Kelola Program MBG di Wilayah Terpencil berdasarkan Keputusan Kepala BGN Nomor 31679 Tahun 2026. Pedoman tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyelenggaraan MBG pada wilayah dengan karakteristik dan kondisi geografis yang berbedaan. Pedoman ini menjadi acuan pelaksanaan MBG pada wilayah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur (Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG perlu memperhatikan kondisi geografis dan kapasitas kelembagaan masing-masing wilayah.

4.2 Problematika Infrastruktur Pendidikan di Daerah 3T sebagai Konteks Implementasi

Hasil telaah terhadap penelitian mengenai pendidikan di daerah 3T menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur masih menjadi salah satu persoalan dalam pemerataan layanan pendidikan. (Falah & Hadna, 2022) mengidentifikasi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, sulitnya akses jalan, serta jauhnya jarak tempuh menuju sekolah sebagai bagian dari permasalahan edukasi di daerah 3T. Situasi ini menyatakan pemerataan edukasi belum cukup dilihat dari keberadaan satuan pendidikan semata. Ketersediaan infrastruktur pendukung juga menjadi bagian penting karena berkaitan dengan keterjangkauan akses serta keberlangsungan penyelenggaraan layanan pendidikan, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan geografis dan fasilitas. Temuan tersebut diperkuat oleh (Astuti & Maisaroh, 2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan ruang kelas, media pembelajaran, dan akses teknologi dapat memengaruhi proses pembelajaran di sekolah 3T. Keterbatasan tersebut juga dapat mengurangi ruang bagi guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang beragam. Oleh karena itu, sarana dan prasarana tidak bisa dilihat sebagai persoalan administratif semata, namun sebagai bagian dari lingkungan yang mendukung keberlangsungan proses pendidikan.



Dalam konteks implementasi MBG, kondisi infrastruktur tersebut menjadi faktor kontekstual yang perlu diperhatikan. Pelaksanaan program melalui satuan pendidikan membutuhkan dukungan operasional untuk proses penerimaan, pengelolaan, distribusi, dan pengawasan makanan. Keterbatasan fasilitas, akses transportasi, maupun kondisi geografis dapat menambah kompleksitas pelaksanaan program, terutama di wilayah 3T. Namun, kondisi tersebut tidak secara otomatis menyebabkan kegagalan implementasi MBG. Infrastruktur lebih tepat dipahami sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kapasitas pelaksanaan, sehingga penyesuaian kebijakan perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah, kapasitas sekolah, pemerintah daerah, dan pihak pelaksana lainnya.

4.3 Tantangan Implementasi MBG di Daerah 3T

Daerah 3T menghadirkan kondisi implementasi yang berbeda dibandingkan wilayah dengan akses infrastruktur yang lebih memadai. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kondisi geografis, jarak, transportasi, fasilitas pendukung, serta kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, implementasi MBG tidak hanya membutuhkan keseragaman tujuan dan standar nasional, tetapi juga penyesuaian mekanisme pelaksanaan dengan karakteristik serta kemampuan masing-masing wilayah. Kebutuhan penyesuaian tersebut tercermin dalam Pedoman Teknis Tata Kelola MBG di Wilayah Terpencil melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 31679 Tahun 2026. Pedoman tersebut secara khusus mengatur tata kelola MBG di wilayah terpencil dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, keterbatasan infrastruktur, distribusi dan logistik, serta tantangan spesifik wilayah (Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, 2026). Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian mekanisme pelaksanaan tanpa mengubah tujuan utama kebijakan secara nasional.

Temuan tersebut sejalan dengan (Yuliani et al., 2026) yang mengidentifikasi keterbatasan infrastruktur distribusi dan kesenjangan kapasitas antarwilayah sebagai bagian dari tantangan implementasi MBG. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas wilayah dalam menerima dan melaksanakan kebijakan nasional.

Berdasarkan temuan tersebut, tantangan implementasi MBG di daerah 3T dapat dipahami melalui beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu akses geografis, infrastruktur pendukung, kapasitas pelaksana, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan. Keterbatasan infrastruktur, misalnya, dapat meningkatkan kompleksitas distribusi, sedangkan keterbatasan kapasitas pelaksana dapat memengaruhi pengelolaan program di wilayah yang sulit dijangkau. Karena itu, implementasi MBG di daerah 3T memerlukan keselarasan antara tujuan kebijakan nasional dan fleksibilitas mekanisme pelaksanaan di tingkat lokal.

4.4 MBG dan Dukungan terhadap Proses Pendidikan

MBG relevan diterapkan dalam lingkungan pendidikan karena pemenuhan kebutuhan gizi berkaitan dengan kondisi peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar. (Suprpto et al., 2025) dalam kajian implementasi awal MBG di Indonesia menempatkan aspek pendidikan sebagai salah satu dimensi program dan menemukan adanya indikasi peningkatan kehadiran sekolah. Namun, penulis juga menekankan bahwa dampak program masih memerlukan pemantauan dan evaluasi yang lebih sistematis.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki keterkaitan dengan kondisi yang mendukung keberlangsungan pendidikan, tetapi tidak dapat dipahami sebagai satu-satunya faktor yang

menentukan hasil pendidikan. Implementasi program dipengaruhi pula oleh mekanisme distribusi, keamanan pangan, pengawasan, serta kapasitas pelaksana.

Dalam konteks Indonesia, (Ariani & Rahim, 2025) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG berkaitan dengan kesiapan sekolah, guru, penyedia makanan, dan kondisi antarwilayah. Mereka secara khusus mencatat bahwa dapur penyedia di daerah 3T menghadapi keterbatasan infrastruktur dan logistik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dukungan MBG terhadap pendidikan perlu ditempatkan dalam lingkungan pendidikan yang lebih luas.

Dengan demikian, MBG lebih tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pendukung pemenuhan hak atas pendidikan, khususnya melalui dukungan terhadap kebutuhan peserta didik, bukan sebagai pengganti penyediaan ruang belajar, guru, fasilitas pembelajaran, maupun infrastruktur pendidikan. Di wilayah 3T, pemenuhan gizi perlu berjalan berdampingan dengan pemerataan sarana dan kualitas layanan pendidikan agar keterbatasan struktural di wilayah tersebut tidak semakin memperlebar kesenjangan layanan.

4.5 Implementasi MBG dalam Perspektif Pemenuhan Hak atas Pendidikan

Hak atas pendidikan perlu dipahami dengan komprehensif, tidak terbatas pada kesempatan untuk mengakses atau mengikuti pendidikan di sekolah. Hak tersebut mencakup tersedianya layanan pendidikan yang dapat diakses dan didukung oleh kondisi yang layak. Dalam konteks daerah 3T, persoalan pemerataan menjadi penting karena perbedaan geografis, infrastruktur, dan kapasitas layanan dapat memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima peserta didik. (Melinda R. Radja et al., 2025) menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan berkaitan dengan kemampuan penyelenggara negara dalam memastikan tersedianya layanan pendidikan bagi masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, MBG dapat ditempatkan sebagai salah satu kebijakan pendukung yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan peserta didik selama mengikuti pendidikan. Namun, pemenuhan hak atas pendidikan tidak dapat disederhanakan menjadi pemenuhan kebutuhan gizi. (Yuliani et al., 2026) menunjukkan bahwa implementasi MBG masih menghadapi keterbatasan infrastruktur distribusi dan kesenjangan kapasitas antarwilayah. Oleh karena itu, MBG dan infrastruktur pendidikan memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. MBG mendukung kebutuhan gizi peserta didik, sedangkan infrastruktur menyediakan lingkungan fisik dan fasilitas yang memungkinkan proses pembelajaran berlangsung. Dalam konteks daerah 3T, pendekatan ini semakin relevan dengan adanya pedoman khusus pelaksanaan MBG di wilayah terpencil melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 31679 Tahun 2026 (Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, 2026). Pedoman ini menunjukkan adanya penyesuaian tata kelola dengan kondisi akses, geografis, dan infrastruktur wilayah.

Dengan demikian, pemenuhan hak atas pendidikan melalui MBG tidak hanya dilihat dari penyaluran makanan, tetapi juga dari keterjangkauan, kesesuaian dengan kondisi wilayah, keberlanjutan, dan pemerataan layanan. MBG dapat menjadi salah satu instrumen pendukung, sementara pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan pendidikan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerataan Pendidikan.

4.6 Sintesis Temuan dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga temuan utama. Pertama, implementasi MBG merupakan proses kompleks yang membutuhkan dukungan kelembagaan, distribusi, pengawasan, dan kesiapan satuan pendidikan. Penelitian (Febryanti et al., 2025) Menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola MBG, sehingga pelaksanaannya bergantung pada kesiapan sistem dan pihak yang terlibat, bukan hanya penyediaan makanan.

Kedua, daerah 3T memiliki kondisi struktural yang berbeda dengan wilayah yang memiliki akses dan fasilitas lebih memadai. Keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, fasilitas pendidikan, dan kapasitas layanan dapat memengaruhi lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan. Oleh



karena itu, penerapan kebijakan nasional di wilayah 3T membutuhkan mekanisme yang mampu menyesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing daerah.

Ketiga, MBG dapat mendukung proses pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi bukan merupakan solusi tunggal terhadap ketimpangan pendidikan. Kajian mengenai program pemberian makanan di lingkungan sekolah menunjukkan adanya keterkaitan dengan sejumlah kondisi pendidikan dan kesehatan. Namun, pemenuhan hak atas pendidikan tetap membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih luas, termasuk ketersediaan infrastruktur, tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, dan akses layanan yang merata.

Ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG di daerah 3T tidak dapat dilepaskan dari kapasitas lingkungan pendidikan tempat kebijakan tersebut dilaksanakan. Keterbatasan infrastruktur dan akses dapat memengaruhi proses distribusi serta kesiapan pelaksana, sehingga implementasi MBG perlu berjalan beriringan dengan agenda pemerataan pendidikan. Dalam konteks tersebut, penguatan infrastruktur, kapasitas layanan, koordinasi antarlembaga, serta penyesuaian mekanisme pelaksanaan menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan program. Dari sisi teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlu dipahami melalui hubungan antara desain kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Dari sisi praktis, temuan penelitian mengarah pada pentingnya pemetaan kapasitas wilayah, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penyesuaian mekanisme distribusi dan pengawasan berdasarkan kondisi geografis dan infrastruktur daerah.

Novelty penelitian ini terletak pada integrasi implementasi MBG, infrastruktur pendidikan 3T, dan pemenuhan hak atas pendidikan, dengan menyoroti pengaruh kondisi wilayah dan kapasitas layanan terhadap pelaksanaan serta kontribusi MBG bagi pemerataan pendidikan.

4.7 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada studi kepustakaan sehingga tidak memperoleh data primer dari sekolah, peserta didik, pemerintah daerah, maupun pelaksana MBG di wilayah 3T. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasikan kondisi seluruh wilayah 3T di Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam aspek geografis, kapasitas pemerintah daerah, ketersediaan fasilitas, akses transportasi, serta mekanisme pelaksanaan program.

Keterbatasan ini sekaligus membuka ruang bagi riset mendatang guna melaksanakan riset lapangan pada wilayah 3T tertentu. Penelitian empiris dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai pengalaman pelaksana, kondisi satuan pendidikan, serta pengalaman penerima manfaat dalam pelaksanaan MBG. Temuan dari studi kepustakaan ini dapat menjadi dasar awal untuk menentukan aspek-aspek yang perlu dikaji dan diuji lebih lanjut melalui penelitian lapangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Capaian riset menyatakan implementasi MBG di daerah 3T terpengaruhi situasi geografis, ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, mekanisme distribusi, dan kapasitas layanan pendidikan. MBG dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi tidak menggantikan kebutuhan terhadap infrastruktur dan layanan pendidikan yang layak. Oleh karena

itu, implementasi MBG perlu berjalan selaras dengan kebijakan pemerataan pendidikan dan disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan hubungan antara desain kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Secara praktis, MBG perlu didukung koordinasi antarlembaga, penguatan infrastruktur, serta mekanisme distribusi dan pengawasan yang adaptif. Kontribusi penelitian terletak pada pengintegrasian implementasi MBG, problematika infrastruktur pendidikan, dan pemenuhan hak atas pendidikan dalam konteks daerah 3T.

Penelitian ini terbatas pada studi kepustakaan sehingga belum menggambarkan pengalaman langsung sekolah, pelaksana program, pemerintah daerah, dan peserta didik di wilayah 3T tertentu. Hasil penelitian karena itu merupakan sintesis dari sumber yang tersedia dan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasikan seluruh kondisi daerah 3T di Indonesia.

5.2 Saran

Menurut capaian riset, berbagai saran bisa diajukan yaitu:

1. Pemerintah dan pengelola MBG perlu menyesuaikan distribusi, fasilitas pendukung, pengawasan, dan koordinasi dengan kondisi geografis serta kapasitas masing-masing wilayah 3T.
2. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan perlu mengintegrasikan pelaksanaan MBG dengan peningkatan sarana prasarana, kapasitas tenaga pendidik, dan fasilitas pembelajaran.
3. Pembuat kebijakan perlu melakukan evaluasi MBG dengan memperhatikan keterjangkauan, keberlanjutan, kesesuaian pelaksanaan, dan kualitas tata kelola, bukan hanya jumlah penerima dan distribusi makanan.
4. Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi lapangan pada wilayah 3T tertentu dengan melibatkan sekolah, pelaksana MBG, pemerintah daerah, guru, orang tua, dan peserta didik untuk memperoleh gambaran empiris yang lebih konkret.

Secara keseluruhan, MBG perlu ditempatkan sebagai instrumen pendukung dalam kebijakan pendidikan yang lebih luas, sehingga pemenuhan gizi peserta didik dapat berjalan bersama dengan pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, dan pemenuhan hak atas pendidikan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, F., & Rahim, R. (2025). KESIAPAN SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS. *Jurnal Analis Kebijakan*, 9(2), 106-110. <https://doi.org/10.37145/dm1a2z02>
- Astuti, N., & Maisaroh, S. (2025). PROBLEMATIKA MINIMNYA SARANA DAN PRASARANA MEMPENGARUHI PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH 3T. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 22(2), 343-350.
- Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2026). *Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terpencil*. <https://www.bgn.go.id/juknis>
- Falah, A. I., & Hadna, A. H. (2022). Problematika Pendidikan Masa Pandemi di Indonesia pada Daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(2), 164-185. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2997>
- Febryanti, I., Indiati, I., Pane, M. A., & Astuti, P. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN



BERGIZI GRATIS (MBG)(STUDI KASUS PADA SDN 3 KEPANJEN KABUPATEN MALANG. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 067-079.
<https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>

Herdiana, D. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 470-478.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15063556>

Melinda R. Radja, Tahunas, N., Maria B. Virani, Wilibrodus Lamauran, & Yustinus F. Tatu. (2025). Kajian Aturan Hak Atas Pendidikan dan Relevansinya Terhadap Pemenuhan Pendidikan Masyarakat Kota Kupang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 268-274.
<https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2.9804>

Pora, S., Muksin, D., & Rahmat, A. F. (2025). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran: Solusi dan Tantangan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 635-694. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4352>

Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fadilah, N., Azhar, N., Oktavini, D., & Munte, A. C. (2024). UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DI DAERAH 3T. *Attadib: Journal of Elementary Education Vol. 6, No. 2, Desember 2022, Hlm. 405 - 418*, 8(2), 405-418.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32832/at-tadib.v6i2.19556>

Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2), 297-312. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.798>

Wang, D., Shinde, S., Young, T., & Fawzi, W. W. (2021). Impacts of school feeding on educational and health outcomes of school-age children and adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 11, 04051. <https://doi.org/10.7189/jogh.11.04051>

Yuliani, F., Juniarsih, W., Prayitno, H. J., & Indri. (2026). KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA: ANALISIS IMPLEMENTASI, DAMPAK TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA, DAN IMPLIKASINYA PADA KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(02), 212-224.